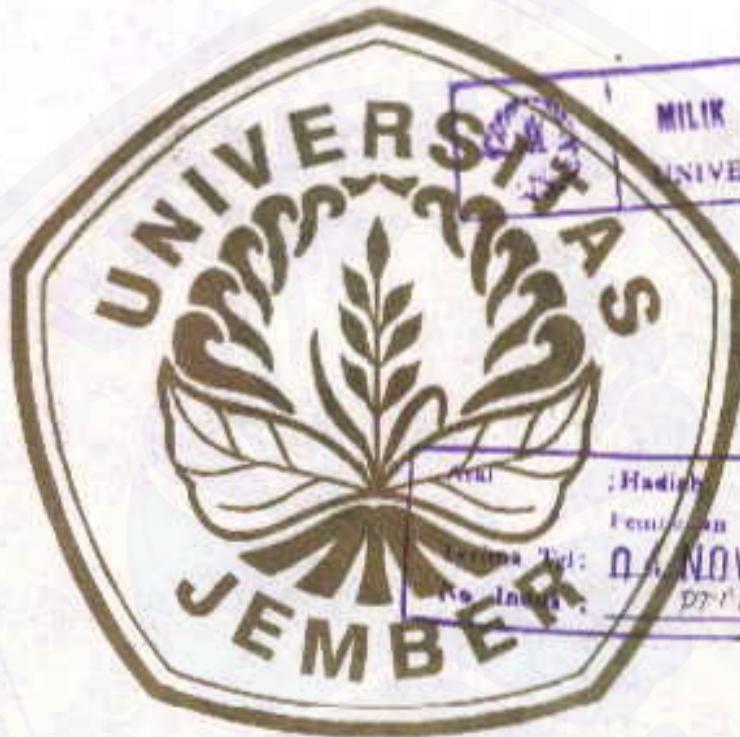


TIDAK DITINJAMKAN KELUAR

PERANAN ANGKATAN 66 DALAM PEMBUBARAN
PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

5
: Hadiah
: 324.2
: 041
: P
: 10mp
: 01 NOV 1999
: DT 199.8.055

Oleh :

Fatkhul Alami Dwiarso

NIM : 9402105226

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
SEPTEMBER 1999

MOTTO

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ . إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّابُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّابُوا
بِالنَّصْرِ . (سورة العصر: ١-٣)

Artinya:

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran (QS. Al'Asr ayat 1-3, dalam Departemen Agama RI, 1990:1099).

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- *Bapak dan ibu tercinta, yang telah berusaha dan berdoa untuk keberhasilanku dalam menuntut ilmu*
- *Kakakku Arief Wahidijanto dan adiku A. Rifai yang telah memberikan memotivasi demi keberhasilanku*
- *Bapak dan ibu guruku yang saya hormati*
- *Temani-temanku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Program Sejarah angkatan 1994 yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini*
- *Almamater yang kubanggakan*

**PERANAN ANGKATAN 66 DALAM PEMBUBARAN
PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan Tim Penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan -Universitas Jember

Oleh :

Nama : FATKHUL ALAMI DWIARSO
Nim : 9402105226
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program : Pendidikan Sejarah
Angkatan : 1994
Daerah Asal : Banjarnegara, Jawa Tengah
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 22 Desember 1973

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



DRA. SRI HANDAYANI

NIP. 131 472 736

Pembimbing II,



DRS. SUMARNO

NIP. 131 403 352

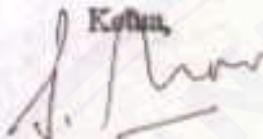
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Jember sebagai skripsi

Pada hari: Selasa

Tanggal : 28 September 1999

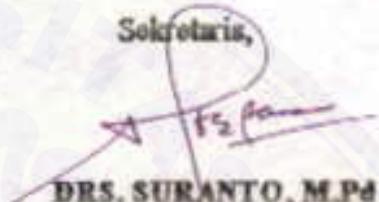
Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,


DRS. SUMARNO

NIP. 131 403 352

Sekretaris,


DRS. SURANTO, M.Pd

NIP. 131 759 834

Anggota :

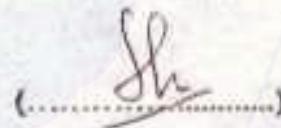
1. **DRS. H. CHOESNOEL HADI**

NIP. 130 145 567


(.....)

2. **DRA. SRI HANDAYANI**

NIP. 131 472 786


(.....)

Mengetahui
Ketua,



DRS. SOEKARDJO BW

NIP. 130 287 101

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember
3. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Jember
4. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP-Universitas Jember
5. Ketua Program Pendidikan Sejarah FKIP- Universitas Jember
6. Pembimbing I dan Pembimbing II
7. Semua Dosen FKIP Universitas Jember
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini

Penulis mendoakan semoga amal baik mereka diberi imbalan oleh Allah SWT. Amien.

Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat diterima dan dapat memberikan manfaat bagi almamater, masyarakat, bangsa dan negara.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi baiknya skripsi ini.

Jember, 28 September 1999

Penulis

RINGKASAN

Fatkul Alami Dwarso, NIM: 9402105226, September 1999, **Peranan Angkatan 66 Dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)**, Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, FKIP-Universitas Jember.

Pembimbing : (1) Dra. Sri Handayani

(2) Drs. Sumarno

Kata Kunci : (1). Peranan Angkatan 66,

(2). Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia sudah dua kali melakukan pemberontakan untuk merebut pemerintahan negara Republik Indonesia yang sah. Pertama, PKI di bawah pimpinan Muso melakukan pemberontakan Madiun tahun 1948, setelah dapat ditumpas tidak ada keputusan PKI dibubarkan. Kedua, setelah merasa mempunyai kekuatan, PKI melakukan perebutan kekuasaan tahun 1965. Rakyat mengetahui, PKI lah yang dibelakang G-30-S., maka Angkatan 66 dengan dukungan rakyat dan ABRI yang anti komunis mempelopori penghancuran PKI. Tindakan Presiden tidak adil, sebab PKI telah menginjak-injak falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila tidak segera dibubarkan. Perjuangan Angkatan 66 mencapai hasil dengan dibubarkan dan dilarangnya PKI dan ormas-ormasnya berdasarkan Kepres No. 1/3/1966 yang dikukuhkan oleh TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 terhitung mulai tanggal 12 Maret 1966. Peranan Angkatan 66 dalam pembubaran PKI penting diteliti untuk mengetahui secara jelas, benar dan obyektif tentang peristiwa sejarah tahun 1965-1966.

Adapun permasalahan yang kami kemukakan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah peranan Angkatan 66 dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan mendalam tentang peranan Angkatan 66 dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat (1). bagi penulis, merupakan wahana latihan pengembangan ilmu, sekaligus memperdalam materi bidang studi sejarah kontemporer tentang perjuangan angkatan 66, (2). bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sejarah, (3). bagi generasi muda, perlu memiliki pengetahuan yang utuh atas kejadian pada tahun 1965-1966 dan memahami betapa tidak sesuainya ideologi komunisme, dengan demikian generasi muda dapat mengambil hikmahnya sebagai bekal memasuki milenium III, (4). bagi alumnus, dapat menambah perbendaharaan kepustakaan Universitas Jember dan merupakan realisasi dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma penelitian dan pengembangan ilmu, (5). bagi sejarawan, sebagai bahan pemikiran untuk mengembangkan penelitian sejarah dan mencari kebenaran secara obyektif berdasarkan kejadian yang sebenarnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 1999 sampai bulan Agustus 1999 dengan studi literatur, sehingga tempat penelitian adalah perpustakaan. Metode penentuan tempat penelitian yang digunakan adalah purposive

sampling, maka perpustakaan yang di gunakan ialah UPT Perpustakaan-Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Sastra-Universitas Jember dan Perpustakaan Jurusan Pendidikan IPS FKIP-Universitas Jember, di samping adanya koleksi pribadi. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian sejarah, dengan langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumenter dan metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

Kesimpulan yang dapat dihasilkan berdasarkan permasalahan dan pembahasan, peranan Angkatan 66 dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu: tampak pada tindakan-tindakan mereka tampil menjadi motor penggerak dan aktif ikut melakukan aksi-aksi turun ke jalan/demonstrasi-demonstrasi sepanjang tahun 1965-1966 dengan mendapat dukungan dari masyarakat yang anti komunis, dan dari tentara yang anti komunis. Mereka menuntut Soekarno agar membubarkan dan melarang PKI, tetapi karena tak berhasil mereka terus mendesak sampai dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang kemudian dengan Supersemar itu akhirnya PKI dibubarkan dan dilarang terhitung mulai tanggal 12 Maret 1966.

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan kesimpulan tersebut adalah: (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya lebih menguasai dan mendalami materi sejarah khususnya materi sejarah Indonesia, (2) bagi sejarawan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengadakan penelitian mengenai sejarah kontemporer secara lebih mendalam, (3) bagi generasi muda, sebaiknya mengetahui secara utuh atas kejadian-kejadian masa lalu dan memahami betapa tidak sesuainya ideologi komunis (Marxisme-Leninisme) dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup berbangsa dan bernegara, (4) bagi almamater, hendaknya lebih meningkatkan perbendaharaan buku-buku literatur sejarah dalam perpustakaan khususnya buku-buku sejarah kontemporer, (5) bagi partai politik dan organisasi masyarakat, masyarakat harus tetap mewaspadaai setiap gejala kebangkitan kembali PKI (ajaran komunis).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI.....	ix
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan.....	1
1.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian	5
1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan.....	6
1.3.1 Ruang Lingkup.....	6
1.3.2 Rumusan Permasalahan.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Latar Belakang Berdirinya Angkatan 66.....	9
2.2 Peranan Angkatan 66 Dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia.....	12

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian.....	17
3.2 Metode Penelitian Sejarah.....	17
3.2.1 Heuristik.....	18
3.2.2 Kritik.....	19
3.2.3 Interpretasi.....	20
3.2.4 Historiografi.....	21
3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian.....	22
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	23
3.5 Metode Analisis Data.....	24
3.5.1 Teknik Logika Komparatif.....	25
3.5.2 Teknik Logika Induktif.....	25

IV. PEMBAHASAN

4.1 Latar Belakang Berdirinya Angkatan 66.....	26
4.2 Peranan Angkatan 66 Dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia.....	36
4.2.1 Aksi-aksi Rakyat Mengganyang PKI.....	36
4.2.2 Aksi-Aksi Tri Tuntutan Rakyat.....	42
4.2.3 Pembubaran Dan Larangan PKI Serta Ormas-Ormasnya.....	52

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran-Saran.....	56

KEPUSTAKAAN	58
--------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian	62
2. Surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 Tentang Pembubaran PKI dan Ormas-Ormasnya.....	63
3. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.....	65
4. Penjelasan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966	68
5. Ijin Keterangan Studi Literatur dari UPT Perpustakaan-UNEJ.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT	71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Partai Komunis Indonesia yang lahir pada tanggal 23 Mei 1920 di Semarang merupakan kelanjutan dari *Idische Social Democratische Vereeniging (ISDV)* atau Serikat Sosial Demokrat India yang di bentuk oleh Sneevliet bersama dengan P.Bersgma, J.A. Brandstedder, H.W. Dekker pada bulan Juli 1914 (Markas Besar ABRI, 1995:5). Dalam konteks historis, komunisme telah membuat catatan khusus yang sangat kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Komunisme di Indonesia telah melahirkan trauma politik yang sungguh sukar dilupakan dalam memori sejarah.

Partai Komunis Indonesia (PKI) telah melakukan, setidaknya dua kali gerakan politik yang dikenal sebagai suatu pemberontakan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Pertama, pada saat negara dihadapkan pada berbagai masalah dan keadaan pasca-proklamasi kemerdekaan, PKI di bawah pimpinan Muso melakukan gerakan yang di kenal pemberontakan Madiun (Madiun Affair) tahun 1948 (Sanit dalam Tekad, 19-25 April 1999:13). Gerakan Muso yang bertujuan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno itu, dirasakan sangat menghantam eksistensi Republik Indonesia. Karena, dilakukan ketika Republik Indonesia di tengah ancaman kolonial Belanda yang hendak merebut kembali Indonesia. Meskipun dalam situasi yang sangat kritis, pemerintah Soekarno berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun, tetapi tidak ada keputusan PKI di larang sesudah tragedi terjadi. Waktu itu pemerintah tidak mau langsung melarang, tetapi menuntut di muka Hakim, karena negara kita adalah negara hukum. Siapa yang bersalah harus di tuntutan dan diserahkan kepada keputusan pengadilan. Apabila Hakim memutuskan PKI bersalah karena melawan atau memberontak, barulah di ambil keputusan untuk membubarkan dan melarang PKI. Akan tetapi, dengan adanya Agresi Militer Belanda II, Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Sala menyatakan daripada mereka menyerah kepada Belanda, lebih baik dihabiskan saja. Pusat perhatian berpindah kepada perang gerilya, persetujuan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB), sampai pengakuan kedaulatan peauh Indonesia di bawah Republik

Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda. Jadi akibat Agresi Militer Belanda II pemberontakan PKI di Madiun tidak di ambil keputusan untuk dibubarkan dan dilarang (Hatta, 1980:21-24).

Adanya sikap pemerintah yang sangat lunak terhadap mereka memberikan peluang bagi PKI melakukan aktivitasnya kembali. Kedua, sikap lunak yang diberikan pemerintah tidak membuat PKI melakukan perbaikan-perbaikan bagi bangsa Indonesia di masa mendatang. Sampai-sampai pada Pemilu 1955 PKI diperbolehkan untuk ikut serta dan meraih 6.176.914 suara atau 16,4 persen menduduki urutan keempat setelah PNI (22,3 persen), Masyumi (20,9 persen), dan NU (18,4 persen) (Sanit dalam Tekad, 19-25 April 1999:13). Pasca Pemilu 1955 PKI terus menyebarkan ajaran-ajaran komunisme kepada rakyat Indonesia. Setelah merasa mendapatkan dukungan dari rakyat dan mempunyai kekuatan, PKI kembali melakukan aksi untuk merebut kekuasaan, yaitu dengan pemberontakan G-30-S/PKI di tahun 1965. Peristiwa itu merupakan tragedi nasional dalam sejarah kontemporer Indonesia (Subhan, 1996:2-3).

Setelah didapati bukti-bukti yang jelas dan nyata bahwa para pejabat-pejabat pemerintah yang sangat berpengaruh pada waktu itu mempunyai hubungan dan terlibat dalam peristiwa kudeta Gerakan 30 September dan rakyat mengetahui, bahwa PKI lah yang berada di belakang peristiwa terkutuk itu, maka timbul amarah bagi seluruh rakyat Indonesia yang secara serentak dan spontan bangkit hampir-hampir tidak terkendali lagi. Dalam hal ini pemuda, pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) mempelopori perjuangan menghancurkan PKI dan ormas-ormasnya dengan mendapat dukungan dari rakyat dan ABRI yang tetap setia kepada Pancasila (Notosusanto, 1985:25).

Pada peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965, Presiden Soekarno tidak memberikan jalan keluar yang tegas. Pidato-pidatonya membuat situasi mengambang dan segala sesuatu menjadi tidak menentu. Peristiwa Gestapu/PKI dengan puncaknya drama Lubang Buaya oleh Bung Karno dikatakan sebagai kejadian yang lazim dalam revolusi. Setelah peristiwa G-30-S/PKI, tindakan dan sikap Presiden Soekarno setelah-

olah masih membela dan tidak menyalahkan serta menguntungkan bagi PKI, seperti dalam pidato dan ucapan-ucapan beliau: (1) kita adalah anak-anak revolusi, dan anak-anak revolusi harus setia kepada induknya, sebab kalau tidak anak itu sendiri akan dimakan oleh induknya, (2) gestoknya harus kita hantam, tetapi komunismya tidak bisa, karena ajaran komunis itu adalah hasil obyektif dalam masyarakat Indonesia seperti halnya nasionalis dan agama, (3) nasakom telah kutulis sejak aku berumur 25 tahun pada 1926 dan akan kupegang teguh sampai masuk keliling kubur, (4) seribu Dewa dari kayangan tak dapat mematikan Nasionalis, mematikan Agama dan mematikan Komunis, (Soeharto, 1967:39-40).

Sikap Soekarno terhadap PKI setelah memberontak tahun 1965 sangat berbeda kepada Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) setelah peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958. Soekarno melarang Masyumi dan PSI dengan alasan karena mereka tidak mengambil tindakan orang-orang yang terlibat dalam PRRI. Masyumi dan PSI telah merintang penyelesaian Revolusi Indonesia dan PKI adalah pelopor kekuatan-kekuatan revolusioner sehingga diperlukan bagi pelaksanaan keadilan sosial dan masyarakat yang makmur (Ma'arif, 1988:71-73). Tindakan Presiden benar-benar sebagai tindakan yang tidak adil, sebab PKI jelas-jelas telah menginjak-injak falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila, dan Bung Karno hanya menjanjikan dalam situasi tidak menentu ini akan adanya "penyelesaian politik" dalam waktu singkat, yang ternyata kemudian tidak diwujudkan sehingga membuat rasa kecewa bagi sebagian besar masyarakat terutama kekuatan anti PKI (Martha, dkk, 1985:353-354).

Berkat semangat dari pemuda yang didukung rakyat dan ABRI yang anti komunis, maka setapak demi setapak perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan mencapai hasil, yaitu Letnan Jendral Soeharto Atas Nama Presiden/Pangti ABR/BPR untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi (Syamsu dan Syamsida, Tanpa Tahun:37).

Terdorong oleh rasa tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan bangsa Indonesia akibat pemberontakan PKI tahun 1965, dan membawa akibat yang sangat luas di lihat dari segi politik dan ekonomi, maka secara tegas Letnan Jendral Soeharto atas nama Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 12 Maret 1966 membubarkan dan melarang PKI serta ormas-omasnya berdasarkan Kepres No. 1/3/1966 yang kemudian dikukuhkan oleh TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 (Sabhan, 1996:98).

Perjuangan rakyat Indonesia yang anti Komunis, dalam membubarkan Partai Komunis Indonesia yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat menarik untuk ditelaah lebih mendalam, karena dengan mengetahui kejadian pada tahun 1965-1966 secara benar dan utuh, maka generasi muda dapat mengambil hikmahnya sebagai bekal memasuki milinium III. Nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa pemberontakan PKI yang berusaha untuk menanamkan dan mengajarkan Komunisme di Indonesia, yaitu agar masyarakat tetap mewaspadaai setiap gejala kebangkitan kembali PKI (ajaran Komunis) di Indonesia.

PKI telah melakukan gerak strategis dan sistimatis, seperti membentuk kader dan pimpinan partai. Setelah itu, mereka melakukan penetrasi terhadap lembaga-lembaga yang akhirnya dikuasai, terakhir melakukan pemberontakan untuk mencapai kekuasaan (Nasution dalam Surya dan Jawa Pos, 27 April 1999:1).

Kecuali faktor kemenarikan seperti di atas, maka berbagai pertimbangan lain mengenai penulisan ini, yaitu (1) Tersedianya data yang diperlukan untuk membahas topik ini, (2) Topik sangat penting untuk di teliti guna mencari kebenaran yang obyektif, (3) Topik ini belum pernah di teliti dilingkungan FKIP-Universitas Jember, serta kesediaan dari dosen pembimbing skripsi ini. Alasan lain dari pemilihan permasalahan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dasar profesionalisme guru, yaitu penguasaan bahan atau materi Sejarah Nasional konteporer.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas itulah sebabnya penulis memilih permasalahan yang dirumuskan dalam kalimat judul "**Peranan Angkatan 66 Dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)**".

1.2 Definisi Oprasional Variabel Penelitian

Untuk memudahkan dan menjaga kesamaan persepsi pengertian judul penelitian ini, maka perlu penjelasan variabel-variabel, yaitu: (1) Peranan Angkatan 66, (2) Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

1.2.1 Peranan Angkatan 66

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan diartikan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Lukman Ali *dkk* 1991:751). Sedangkan M.G. Tan (1997:12) dalam Koentjaraningrat (Red) peranan adalah perilaku seseorang dalam kedudukan tertentu. Perilaku di sini juga sama artinya dengan tindakan atau kegiatan. Maka peranan yang dimaksud dalam variabel peranan Angkatan 66 adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Angkatan 66.

Angkatan 66 adalah semua kelompok yang terlibat dalam menyetujui perjuangan dan aksi-aksi tahun 1965-1966, yang terdiri atas mahasiswa, pemuda, pelajar dan rakyat yang mendapat dukungan dari ABRI dalam menghaacurkan rezim Orda Lama, yang tetap membela terus hidupnya komunisme (PKI) di Indonesia (Sadi, 1989:16). Jadi pengertian peranan Angkatan 66 yang kami maksudkan adalah kegiatan atau usaha-usaha/tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa, pemuda, pelajar dan rakyat dengan dukungan ABRI pada tahun 1965-1966 dalam menumbangkan rezim Orda Lama, khususnya mengganyang arsitek Nasakom.

1.2.2 Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Pengertian Pembubaran adalah suatu proses perbuatan atau cara membubarkan (Lukman Ali *dkk*, 1991:733). Sedangkan Partai Komunis Indonesia adalah kepanjangan dari Partai Komunis di Indonesia yang lahir di Semarang pada tanggal 23 Mei 1923

sebagai kelanjutan dari Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) atau Serikat Sosial Demokrat Hindia (Indonesia) (Jakup dan Nasution, tanpa tahun:99). Jadi pengertian pembubaran Partai Komunis Indonesia adalah suatu cara membubarkan Partai Komunis di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pengertian variabel-variabel di atas, maka maksud penelitian dengan judul "Peranan Angkatan 66 Dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia" adalah sebuah pengkajian mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, pemuda, pelajar dan rakyat dengan dukungan ABRI pada tahun 1965-1966 untuk membubarkan Partai Komunis di Indonesia, karena ingin mengganti ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ideologi lain, yaitu komunisme (Maxisme dan Leninisme).

1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan

1.3.1 Ruang Lingkup

Menurut M.G. Tan (1997:17) dalam bukunya Koentjaraningrat (Red) dikatakan bahwa dalam melakukan suatu penelitian kalau masalahnya sudah terpilih, maka perlu ditetapkan ruang lingkup. Langkah ini penting sekali agar peneliti tidak terjerumus ke dalam sekian banyak data yang tidak berguna bagi penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu diberi batasan ruang lingkup pembahasannya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini mengambil ruang lingkup waktu, mulai tanggal 30 September 1965, yaitu saat terjadinya peristiwa G-30-S/PKI sampai tanggal 12 Maret 1966. Tanggal 30 September 1965 dijadikan batas awal penelitian, karena tanggal tersebut PKI kembali melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan Republik Indonesia dari pemerintah yang sah. Sedangkan tanggal 12 Maret 1966 adalah saat PKI serta ormas-ormasnya dibubarkan dan dilarang hidup di Indonesia sebagai batas akhir penelitian ini.

Mengenai ruang lingkup tempat peristiwa sejarah dalam penelitian ini, penulis fokuskan pada wilayah Indonesia, karena peristiwa ini terjadi di wilayah tersebut.

Ruang lingkup materi pembahasan dalam penelitian ini akan terfokus pada latar belakang berdirinya dan peranan Angkatan 66 dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia

1.3.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan adalah yang pertama kali harus dipikirkan sebelum suatu penelitian dilakukan. Permasalahan harus dianalisis sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui apabila hendak berjalan terus (Surakhmad, 1989:33).

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan ruang lingkup di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Angkatan 66 dalam pembubaran PKI ?. Untuk membahas atau menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis tidak merumuskan hipotesis secara eksplisit, dengan alasan : penelitian semacam ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan sesuatu apa adanya dari berbagai aspek. Menurut Surakhmad (1989:138) di dalam penelitian historik yang bersifat deskriptif, peneliti tidak harus merumuskan hipotesis penelitian secara eksplisit.

1.4 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan permasalahan yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui secara jelas dan mendalam tentang latar belakang berdirinya dan peranan Angkatan 66 dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemilihan permasalahan, rumusan permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. mendapatkan gambaran yang utuh dan benar tentang latar belakang berdirinya Angkatan 66,
2. mendapatkan gambaran secara benar dan obyektif tentang peranan Angkatan 66 dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia.

3. dapat mengetahui secara jelas, benar dan obyektif tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormasnya yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain manfaat tersebut di atas, penelitian ini juga diharapkan akan bermanfaat:

1. bagi penulis, merupakan wahana latihan pengembangan ilmu, sekaligus memperdalam materi bidang studi sejarah kontemporer tentang perjuangan angkatan 66;
2. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sejarah dan dipetik nilai edukatifnya yakni untuk bertindak lebih bijaksana dengan berbekal melihat peristiwa-peristiwa yang telah lalu;
3. bagi generasi muda, dapat memiliki pengetahuan yang utuh atas kejadian pada tahun 1965-1966 dan memahami betapa tidak sesuainya ideologi komunisme dengan ideologi Pancasila, yang telah sama-sama disepakati seluruh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian generasi muda dapat mengambil hikmahnya sebagai bekal memasuki milenium III,
4. bagi almamater, dapat menambah perbendaharaan kepustakaan Universitas Jember dan merupakan realisasi dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma penelitian dan pengembangan ilmu;

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Latar Belakang Berdirinya Angkatan 66

Setelah pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 tidak dapat diselesaikan secara tuntas, PKI melakukan aktivitasnya kembali. Pada tanggal 1 Oktober 1965 suatu peristiwa terjadi di ibu kota Jakarta yang membawa perubahan besar di Indonesia. Pada waktu dini hari tanggal tersebut, enam perwira tinggi dan seorang kapten Angkatan darat di bunuh dalam rangka apa yang disebut Peristiwa Gestapu (Noer, 1991:601).

Di Yogyakarta terjadi pula peristiwa serupa yaitu penculikan Kolonel Inf. Katanso dan Kepala Stafnya, Letkol Inf. Sugijono, dari Markas Korem 072/Pamungkas. Kedua orang tersebut di bawa ke Kentungan. Pada tanggal 2 Oktober 1965 sekitar pukul 02.00 dini hari, kedua perwira tersebut dibunuh (Sekretariat Negara RI, 1994: 109).

Penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal A.H. Nasution Menhankam/Kasab mengalami kegagalan, karena beliau berhasil menyelamatkan diri dengan jalan memanjat tembok samping rumahnya. Sementara itu Ade Irma Suryani putrinya terkena tembakan dari para penculik dan pada akhirnya meninggal di rumah sakit. Ke enam Jenderal tersebut mati dibunuh secara kejam oleh anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani (Puspongoro dan Notosusanto, 1993:390).

Pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 07.15 pagi melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta Letkol Untung mengumumkan, bahwa Gerakan 30 September yang dipimpinnya adalah gerakan Intern Angkatan Darat. Gerakan yang dilancarkan hanya ditujukan kepada beberapa orang Jenderal "Kontra Revolusioner" yang menjadi anggota "Dewan Jenderal" dan merencanakan sebuah kudeta tanggal 5 Oktober 1965. Sebagai kelanjutan dari tindakan itu akan di bentuk sebuah "Dewan Revolusi" baik di pusat maupun di daerah-daerah (Boerhau dan Soebekti, 1965: 163; Martha, dkk, 1985:342).

Setelah Letnan Jenderal Soeharto mendengar dan menerima laporan tentang penculikan terhadap enam Jenderal dan mendapat siaran dari RRI pada jam 14.00 WIB beliau mengambil inisiatif mengumpulkan Angkatan Darat yang ada di Mabes Kostrad.

Atas persetujuan yang sudah, pimpinan Angkatan Darat di bawah komando Letnan Jenderal Soeharto untuk menguasai keadaan, ia tidak bisa bertubungan dengan Presiden Soekarno yang berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma sebab daerah itu dikuasai oleh "Gerakan 30 September". Dengan demikian bagi Mayor Jenderal Soeharto, Presiden Soekarno tidak dapat dimintai petunjuknya atau perintah untuk menguasai keadaan (Pusponegoro dan Notosusanto, 1993: 392-393).

Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekelompok mahasiswa Bandung berkumpul melakukan pernyataan sikap berdiri di belakang Siliwangi sambil menjaga keamanan dan ketertiban di dalam persatuan dan kesatuan. Dengan tegas menolak Dewan Revolusi, karena di belakang Gerakan 30 September adalah PKI tetapi tetap setia kepada revolusi yang sah. Tindakan itu juga diikuti oleh mahasiswa Jakarta pada saat diselenggarakan kursus kader Pemuda Muhammadiyah tanggal 1 Oktober 1965 mereka membentuk Komando Kesiap-siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) yang menuntut pembubaran PKI (Martha dkk, 1985:33-34).

Pada tanggal 2 Oktober 1965 sore, situasi ibu kota Jakarta mulai dapat dikuasai oleh Letnan Jenderal Soeharto, setelah pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) merebut kembali RRI hanya dalam 20 menit dari pasukan Bima Sakti, dan setengah jam kemudian pada jam 20.00 WIB Mayor Jenderal Soeharto berpidato di muka radio memberitahukan rakyat tentang peristiwa yang telah dan sedang terjadi (Muhaimin, 1982:193).

Tanggal 3 Oktober 1965 malam, RPKAD berhasil menguasai Lubang Buaya yang termasuk lingkungan Pangkalan Angkatan Udara Perdana Kusuma. Dengan bantuan anggota Polri, RPKAD menemukan tempat pembunukan Pahlawan-Pahlawan Revolusi yaitu sebuah liang tempat Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawannya itu dilemparkan dan ditimbun di sebuah sumur tua. Keesokan harinya, 4 Oktober 1965 penggalian dan pengambilan jenazah itu dapat dikerjakan (Nasution, 1988:281).

Di Jakarta sejak tanggal 5 Oktober 1965 setelah acara pemakaman Pahlawan Revolusi yang mendapat kehormatan besar dari masyarakat ibu kota dan situasi agak reda, kelompok mahasiswa Islam melancarkan sebuah demonstrasi yang mendesak agar

Presiden Soekarno membubarkan PKI. Partai ini dituduh sebagai dalang dari pembunuhan ke enam orang Jenderal pada malam 30 September (Raillon, 1985:13).

Perkembangan situasi yang dinanti-nantikan oleh masyarakat adalah hasil sidang Kabinet yang pertama setelah terjadinya "peristiwa 30 September". Sidang diadakan di Istana Bogor pada tanggal 6 Oktober 1965 dan pada kesempatan itu juga telah hadir Nyoto dan H.M Lukman, 2 dari 3 orang pimpinan tertinggi PKI dengan status sebagai Menteri. Pada sidang Kabinet itu Presiden Soekarno menyampaikan penilaiannya, bahwa kejadian Gerakan 30 September itu hanyalah merupakan riak ditengah gelombang samudra (Moechtar, 1998:89).

Di pihak lain, sikap Presiden Soekarno itu telah menimbulkan situasi tidak menentu dalam masyarakat. Situasi itu diulur-ulur Presiden Soekarno dengan janji-janji agar masyarakat menunggu "Penyelesaian Politik" yang tidak pernah diwujudkan. Akibatnya masyarakat yang sudah lama tertekan ketakutan karena teror mental dengan provokasi dan intimidasi dari PKI, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Aceh tidak puas dengan sikap Presiden Soekarno, bahwa peristiwa G-30-S/PKI bagaikan riak samudra saja. Tampaknya ia berusaha mengembangkan situasi dan menunggu saat yang tepat untuk merehabilitasi PKI. Hal ini nampak dari pidato dan tindakannya yang selalu membela dan menguntungkan G-30-S/PKI (Martha dkk, 1985:350).

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang berdirinya angkatan 66 dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia adalah bangsa Indonesia telah mengalami dua kali penghianatan dari pihak Partai Komunis Indonesia yaitu pada tahun 1948 dan 1965. Dengan meletusnya peristiwa G-30-S/PKI 1965, Presiden Soekarno tidak memberikan jalan keluar yang tegas, sehingga membuat situasi mengambang dan segala sesuatu menjadi tidak menentu. Tindakan dan sikap Presiden Soekarno tidak adil yang masih membela dan menguntungkan PKI. Hal ini membuat rasa kecewa, bagi sebagian besar masyarakat yang anti terhadap PKI.

2.2 Peranan Angkatan 66 Dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Dengan adanya inisiatif yang cepat oleh kekuatan Pro-Pancasila, baik dengan aksi masa maupun aksi militer maka kekuatan Gestapu tersudut. Satu demi satu, para pemimpin pemberontak tertangkap. Kegiatan perlawanan terhadap Gestapu semakin meningkat setelah jenazah para Pahlawan Revolusi dimakamkan di Jakarta (Martha *dkk.* 1985:347-348).

Gelombang amarah meliputi seluruh bangsa Indonesia yang akhirnya mencetuskan suatu tuntutan agar PKI dibubarkan dan diadili atas perbuatan-perbuatannya. Kemarahan rakyat dinyatakan dalam bentuk rapat-rapat umum dan demonstrasi yang dilancarkan di jalan-jalan. Timbul aksi corat-corat yang menuntut supaya pemimpin PKI diadili serta pembersihan aparat negara dari unsur PKI (Sundhaussen, 1988:183).

Pada tanggal 2 Oktober 1965 pagi, pimpinan parpol/ormas datang ke kantor gabungan V KOTI atas undangan Brigjen Sutjipto SH. Secara jelas Brigjen Sutjipto SH menerangkan segala sesuatu yang terjadi, terutama jalannya perebutan kekuasaan oleh G-30-S/PKI. Pada akhir pertemuan ditandatangani pernyataan bersama yang isi utamanya adalah mengutak perbuatan kontra revolusi dari apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September (Martha *dkk.* 1985:345).

Sementara itu, sentimen anti PKI di kalangan sipil sedang memperoleh momentum. Pada tanggal 4 Oktober, di Jakarta berlangsung sebuah rapat umum kesatuan aksi mengganyang Gerakan Kontra Revolusi 30 September (KAP-Gestapu) yang di bentuk oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan organisasi-organisasi massa mereka masing-masing. KAP-Gestapu menuntut agar semua partai dan organisasi yang punya hubungan dengan gerakan Untung di larang. Di Bandung, cabang NU, Muhammadiyah dan Pergerakan Tarbiyah Indonesia (Perti) Jawa Barat bersama-sama menuntut agar PKI di larang (Sundhaussen, 1988:374-135).

Kegiatan penindakan terhadap PKI yang semula hanya timbul secara spontan dari masing-masing golongan, massa pemuda, mahasiswa, dan pelajar kemudian menjadi

lebih luas. Pada tanggal 23 Oktober 1965 berbagai partai politik yaitu, Nahdatul Ulama (NU), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Unsur-unsur Pergerakan Tarbiyah Indonesia (Perti), unsur-unsur PNI serta unsur ormas-ormas anti komunis, seperti Muhammadiyah, SOKSI, dan lain-lain membentuk dan bergabung menjadi Front Pancasila (Sekretariat Negara RI, 1994:134-135).

Di tengah suasana politik yang tidak menentu, masyarakat dikejutkan oleh kebijaksanaan pemerintah pada tanggal 13 Desember 1965. Pemerintah melakukan pemotongan nilai uang (senering) secara drastis. Seribu rupiah uang lama berubah nilainya menjadi satu rupiah uang baru. Tidak cukup dengan tindakan itu, pemerintah segera menaikkan harga minyak tanah dan tarif angkutan (Anwar, 1981:1; Sundhassen, 1988:395-396; dan Moectar: 1998:109-110).

Pengumuman mengenai harga-harga baru itu mencetuskan reaksi yang paling keras dari pihak sebuah kekuatan politik baru, di bawah naungan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1965, di rumah Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) Syarif Thayeb (Savit, 1987:100; Saunhassen:1988:396; dan Nasution, 1988:338). KAMI akan menjadi motor utama dari kegiatan-kegiatan Angkatan 66 dan memainkan peranan pokok dalam arena politik selama dua tahun berikutnya (Raillon, 1985:14).

KAMI mengeluarkan pernyataan pertama pada tanggal 6 Januari 1966 yang mendesak, agar keputusan-keputusan tentang kenaikan harga dan tarif ditinjau kembali. Tetapi Wakil Perdana Menteri III Khairul Saleh memberikan reaksi bahwa peraturan yang telah diambil tidak akan ditinjau kembali. Jawaban Khairul Saleh membuat ketidakpuasan dikalangan generasi muda dan masyarakat umumnya. Maka kemudian Presidium KAMI mengadakan rapat. Masalahnya di bagi dua yaitu perjuangan secara konseptual dan perjuangan melalui aksi masa. Secara konseptual adalah melalui seminar ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Perlu pula aksi masa dirumuskan tema perjuangan. Gerakan aksi-aksi (demonstrasi) massal yang dimotori oleh KAMI sampai

pada puncaknya dengan rumusan tuntutan yang kemudian dikenal dengan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) (Kurnaidi, 1987:223; Moedjanto, 1993:74; dan Dydo, 1993:85).

Demonstrasi tidak hanya di Jakarta, melainkan juga di Bandung, Yogyakarta, Ujungpandang, Aceh dan kota-kota lainnya. Ganyang Gestapu/PKI?, "Bubarkan PKI" adalah tulisan yang dapat dibaca ditembok-tembok. Perjuangan kaum muda bukan tidak dipahami Bung Karno. Karena itu Bung Karno menyampaikan undangan kepada delegasi KAMI untuk menghadiri sidang Kabinet Dwikora di Istana Bogor 15 Januari 1966. Akhirnya, Presiden menyerukan untuk membentuk barisan Soekarno (Martha dkk, 1985:375; Saidi, 1989:80).

Pada tanggal 21 Februari 1966 Soekarno mengumumkan susunan "Kabinet Dwikora Yang di Sempurnakan" Jenderal A.H Nasution, Laksamana Muda Martadinata dan Arudji Kartawinata tidak lagi duduk dalam kabinet, sedangkan tokoh-tokoh yang pro G-30-S/PKI seperti Omar Diani, Dr. Soebandrio, Achmadi, Achadi, Sudibjo dan Ir. Surachman tetap dipertahankan dalam kabinet (Moechtar, 1998:155). Jadi jelas, bahwa Soekarno menyingkirkan orang-orang anti PKI merangkul orang-orang PKI

Tanggal 24 Februari 1966 pemerintah akan menyelenggarakan upacara pelantikan Kabinet. Mahasiswa berusaha menggagalkan upacara pelantikan tersebut. Pagi-pagi masa mulai bergerak, menuju Istana Merdeka tetapi tertahan pasukan keamanan. Masa terus mendesak mendekati Istana, Cakrabirawa kehilangan kesabaran, dan langsung menembak mahasiswa dan pelajar. Arief Rahman Hakim, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) tewas, pelajar putri yang tewas adalah Zubaidah (Anwar, 1981:140; Martha dkk, 1985:381; dan Moechtar, 1998:158-159).

Peristiwa ini mendorong pelajar dan mahasiswa tidak mau mundur lagi dari aksi perjuangan untuk menuntut terlaksananya Tritura. Perkembangan selanjutnya lahir kesatuan-kesatuan aksi lain, seperti KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia), KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia), KAPNI (Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia), dan KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia). Di sini ikut orang-orang dari partai, ormas-ormas dan non partai bersatu berjuang, inilah yang dinamakan Angkatan 66 (Nasution, 1988:375).

Sepanjang tahun 1966 KAMI melancarkan aksi-aksi yang mendapat dukungan dari masyarakat karena sifat mereka yang anti Komunis. Selain itu, diam-diam KAMI mendapat dukungan dari tentara yang selalu melindungi mereka dari serangan tentara dan kekuatan politik yang memusuhi mereka yaitu yang pro PKI. (Raillon, 1985:14-15).

Akibat dari aksi-aksi tersebut, KAMI di seluruh Indonesia dinyatakan dilarang untuk mengadakan demontasi-demonstrasi dan pengumpulan mahasiswa oleh Keputusan Ganyang Malaysia (KCGAM). Keputusan pembubaran KAMI tanggal 26 Februari 1966 berdasarkan Keputusan Presiden No. 41/KOGAM/1966. (Anwar, 1981:147; Nasution, 1988:381). Karena aksi-aksi mahasiswa dianggap sebagai usaha untuk menjatuhkan kepemimpinan Soekarno. Aksi-aksi mahasiswa telah ditanggapi oleh musuh-musuh revolusi yaitu kaum kontra revolusi dari dalam negeri dan NEKCLIM dari luar negeri.

Dengan dibubarkannya KAMI, dirasakan perlunya suatu alat perjuangan lain. Perkembangan situasi yang amat cepat menuntut pemikiran akan perlunya badan organisasi perjuangan yang berlandaskan disiplin ketat dan bersemangat militer. Kebutuhan yang mendesak memerlukan tim pemikir yang memusatkan pemikiran kepada taktik perjuangan. Hasil rumusan pemikiran tim ini ialah perlunya suatu badan yang efektif. Untuk itu, dibentuklah Laskar Ampera (Martha, dkk, 1987:384).

Dalam situasi yang semakin tegang itulah pada tanggal 11 Maret 1966 diadakan sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan didampingi ke tiga Waperdam, yakni Dr. Soebandrio, Dr. J. Leimena dan Dr. Chairil Saleh. Tiba-tiba Soekarno mendapat laporan tertulis tentang adanya pasukan-pasukan yang dicurigai di sekitar Istana. Jenderal Sabur Menasehatkan, agar supaya Presiden Soekarno mengungsi ke Istana Bogor (Notosusanto, 1983:11; Nasution, 1988:389).

Setelah Mengikuti sidang Kabinet Mayjen Basuki Rachmat, Mayjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Macmud merasa khawatir, Presiden semakin terpengaruh oleh pandangan PKI melalui Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Dr. Soebandrio. Mereka berpendapat, bahwa Presiden Soekarno harus diyakinkan, bahwa penyelesaian yang terbaik adalah dengan membubarkan PKI. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966

Presiden Soekarno memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kesetabilan jalannya revolusi. (Martha dkk, 1985:395-397; Noer, 1991:603).

Setelah Soeharto, dengan mandat yang ia terima dari Presiden Soekarno itu, maka ia dengan atas nama Presiden menetapkan untuk membubarkan dan melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan semua organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya pada tanggal 12 Maret 1966 secara resmi (Noer, 1991:604).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan angkatan 66 dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia, yaitu menjadi motor penggerak dan aktif ikut melakukan aksi-aksi yang dipelopori oleh KAMI sepanjang tahun 1966 dengan mendapat dukungan dari masyarakat karena sifat mereka yang anti komunis dan tuntutan-tuntutan mereka bawakan. Selain itu, diam-diam KAMI mendapat dukungan dari tentara yang anti Komunis dan selalu melindungi mereka dari serangan tentara dan kekuatan politik yang memusuhi mereka yaitu yang pro PKI. Perjuangan mereka berhasil dengan dibubarkan dan dilarangnya PKI terhitung mulai tanggal 12 Maret 1966.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Sebelum menentukan Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian metode penelitian itu sendiri. Hal ini karena suatu penelitian tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan metode ilmiah (scientific method). Pengertian metode dalam arti kata sesungguhnya adalah cara atau jalan (Habeyb, 1983:233). Sedangkan Sjamsuddin (1996:48) mengartikan metode adalah merupakan jalan, cara seseorang memperoleh pengetahuan. Pengertian penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Hadi, 1987:4).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian adalah cara yang dipergunakan oleh seorang peneliti dalam usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau memecahkan suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara untuk menganalisa, menafsirkan dan memecahkan masalah secara ilmiah.

Berkaitan dengan uraian di atas Nazir (1988:54) mengelompokkan metode penelitian menjadi lima macam. Metode penelitian tersebut meliputi: (1) metode penelitian sejarah, (2) metode penelitian deskriptif, (3) metode penelitian eksperimen, (4) metode grounded research, (5) metode penelitian tindakan. Dari kelima macam metode penelitian tersebut, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah. Hal ini dikarenakan data-data yang dipergunakan serta langkah-langkah yang dilakukan merupakan jenis penelitian sejarah. Untuk jelasnya mengenai metode penelitian sejarah akan diuraikan di bawah ini.

3.2 Metode Penelitian Sejarah

Penelitian yang bertujuan untuk menyusun cerita sejarah yang sistematis dan obyektif, diperlukan metode sejarah yang merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1988:32). Sedangkan

menurut Notosusanto (1971:17) metode sejarah adalah prosedur dari sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan pada masa lampau.

Penelitian sejarah dapat di bagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu: (1) penelitian komperatif, (2) penelitian yuridis atau legal, (3) penelitian biografis, (4) penelitian bibliografis (Nazir 1988:61). Sedangkan penelitian ini karena merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun karya-karya tertentu sebagai sumber acuan, maka termasuk jenis penelitian bibliografis. Penelitian bibliografis adalah suatu jenis penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah untuk mencari, mengunalisa, membuat interpretasi serta generalisasi dari metode penelitian sejarah akan diuraikan fakta-fakta yang merupakan pendapat dari para ahli (Nazir, 1989 62).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur kerja sejarawan untuk menguji dan menganalisa sumber-sumber sejarah yang berupa rekaman dari peninggalan masa lampau secara logis, kritis, dan kronologis kemudian disajikan menjadi kisah sejarah.

Metode penelitian sejarah menggunakan langkah-langkah meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Adapun langkah-langkah tersebut diuraikan satu persatu seperti di bawah ini

3.2.1 Heuristik

Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein yang berarti menemukan sumber-sumber (Notosusanto, 1971:17). Sedangkan menurut Sutrasno (1975:45) heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah yang akan digunakan untuk penulisan sejarah atau mencari sesuatu yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah . Heuristik adalah suatu kegiatan untuk menghimpun jejak-jejak sejarah. Maksudnya adalah mencari atau menemukan jejak-jejak sejarah atau buku-buku yang dapat digunakan sebagai sumber untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian sejarah. Jadi heuristik merupakan langkah awal dalam

penelitian sejarah, yakni kegiatan mengumpulkan dan menemukan sumber-sumber yang memuat data-data tentang masa lampau yang berhubungan dengan permasalahan.

Menurut Notosusanto (1971:18), sumber sejarah dapat di bagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (1) sumber benda (bangunan, senjata, perkakas); (2) sumber tertulis (dokumen); (3) sumber lisan (hasil wawancara). Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat bibliografis, sehingga sumber yang digunakan adalah sumber tertulis yang terdapat di perpustakaan (bibliothek = perpustakaan, grafein = ukisan). Jejak-jejak sejarah yang di himpun berupa buku-buku sumber yang memuat pendapat-pendapat para ahli sejarah tentang masalah yang penulis teliti. Sumber tertulis dapat di bagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri, sedangkan sumber sekunder adalah sumber informasi dari seseorang yang bukan merupakan pelaku kejadian dan tidak melihat peristiwa tersebut dengan mata kepala sendiri atau berasal dari penuturan orang lain. Dari kedua sumber tersebut penulis lebih banyak menggunakan sumber primer yaitu pendapat-pendapat dan tulisan-tulisan dari orang yang melihat secara langsung dan mengalami peristiwa itu sendiri sehingga data dihasilkan secara valid.

3.2.2 Kritik

Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah melakukan kritik. Kritik adalah langkah aktivitas di dalam metode penelitian sejarah yang dimaksudkan untuk menyeleksi atau menilai sumber sejarah menjadi fakta sejarah (historical fact) (Notosusanto, 1971:17). Kritik dilakukan untuk mengetahui keaslian dan keotentikan sumber-sumber yang telah dikumpulkan dari langkah heuristik. Oleh karena itu, sumber-sumber yang telah dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah dan di kaji lagi karena dalam penulisan sejarah tidak bisa lepas dari pengaruh penulis, baik sikap, kejujuran, pandangan hidup, otoritas, maupun proses pencetakan ulang buku tersebut.

Kritik sumber dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap

aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Setiap sumber harus dinyatakan dahulu ontentik dan integral, saksi mata atau penulis harus orang yang dapat dipercaya (*credible*). Sedangkan kritik internal adalah kritik yang menekankan aspek dalam yaitu kebenaran isi dari sumber (Sjamsuddin, 1996:104-111). Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian suatu sumber dengan cara memilah-milah apakah memang sumber itu yang dikobendaki, kemudian sumber itu di kaji untuk memastikan apakah sumber itu masih asli atau turunan. Setelah kritik eksternal dilakukan kemudian dilakukanlah kritik internal. Kritik internal bertujuan untuk meneliti kebenaran dari isi sumber. Oleh karena itu kritik intern dilakukan dengan menyoroti sifat-sifat sumber, pengarang sumber serta membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber (Notosusanto, 1971:21).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah kritik adalah kegiatan menilai, menguji atau menyeleksi sumber sejarah untuk mendapatkan sumber sejarah yang benar, yakni benar-benar diperlukan, benar-benar asli (*otentik*) serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang yang akan disusun. Untuk mendapatkan fakta, kritik eksternal dan kritik internal dilakukan secara bersamaan.

3.2.3 Interpretasi

Langkah ketiga dalam penelitian sejarah adalah melakukan interpretasi. Interpretasi adalah proses penafsiran terhadap fakta. Pengertian interpretasi ialah langkah aktivitas menafsirkan fakta-fakta sejarah sedemikian rupa sehingga masing-masing fakta sejarah saling berhubungan atau berkait mejadi rangkaian yang masuk akal dan bermakna (Notosusanto, 1971:17). Peristiwa-peristiwa yang satu harus dimasukan ke dalam konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya. Fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan itu perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga fakta yang satu dengan fakta yang lainnya merupakan rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan kesesuaian satu sama lainnya (Widja, 1988:23). Dengan kata lain rangkaian kata-kata itu harus menunjukkan rangkaian

yang bermakna dari gejala, peristiwa atau gagasan yang tertulis di masa lampau yang tersusun secara sistematis kronologis dan logis.

Jadi yang di maksud interpretasi adalah aktivitas merangkai dan menghubungkan atau mengaitkan fakta-fakta sejarah dengan berusaha seobyektif mungkin sehingga dapat mengungkapkan kehidupan masyarakat masa lampau beserta segala aktivitasnya secara faktual, rasional dan kronologis.

2.2.4 Historiografi

Langkah terakhir dalam penulisan sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah penyajian dari hasil interpretasi dalam kisah sejarah secara tertulis. Historiografi adalah klimak dari penelitian sejarah dan merupakan bagian dari metode sejarah yaitu penulisan hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang telah disesuaikan secara analisis, kronologis dan sistematis menjadi suatu kisah yang selaras (Notosusanto, 1971:24). Sedangkan menurut Gottschalk (1988:33) mengartikan historiografi sebagai usaha merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau atau usaha menginterpretasi fakta menjadi kisah. Kegiatan penulisan sejarah menjadi kisah sejarah, ini dilakukan dari hasil interpretasi dari fakta-fakta sejarah, sehingga diperlukan suatu kemampuan dan kemahiran seorang sejarawan.

Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk memahami sejarah. Untuk merangkai fakta-fakta agar menjadi suatu kisah sejarah yang benar dan obyektif, ketika sejarawan memasuki tahap menulis maka ia mengerahkan seluruh daya pikirnya, bukan saja ketrampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama adalah penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena pada akhirnya ia harus menghasilkan suatu sintesis dari hasil penelitiannya atau penemuannya di dalam penulisan yang utuh (Syamsuddin, 1996:153). Fakta-fakta yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, diinterpretasi sehingga menghasilkan fakta yang akurat dan logis sebagai bahan penulisan sejarah.



Jadi yang dimaksud historiografi ialah usaha untuk mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dan diyakini kebenarannya, kemudian menyusunnya secara kronologi, sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian bibliografis, maka tempat penelitian yang tepat adalah perpustakaan, karena di perpustakaan terdapat buku-buku, data-data berupa pendapat ahli yang diperlukan dalam penelitian. Gottschalk (1988:48), mengatakan bahwa laboratorium penelitian yang lazim bagi sejarawan adalah perpustakaan.

Untuk menentukan perpustakaan yang dijadikan tempat penelitian, maka digunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu yang di buat peneliti sendiri berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya oleh peneliti (Hadi, 1987:82). Dengan demikian penentuan perpustakaan sebagai tempat penelitian, penulis lakukan berdasarkan informasi sebelumnya, bahwa perpustakaan-perpustakaan tertentu menyediakan sumber-sumber yang dapat penulis gunakan untuk memecahkan permasalahan. Di wilayah Jember banyak perpustakaan yang menyediakan sumber-sumber yang dapat penulis gunakan untuk memecahkan permasalahan yang penulis ajukan, misalnya: Perpustakaan Daerah TK II Jember, UPT Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Sastra - Universitas Jember, Perpustakaan Jurusan pendidikan IPS FKIP - Universitas Jember dan lainnya.

Adapun tempat atau lokasi yang di pilih dalam penelitian ini adalah UPT Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Jurusan pendidikan IPS FKIP-Universitas Jember, dan Perpustakaan - Fakultas Sastra Universitas Jember. Penulis menentukan tempat penelitian sebagaimana tersebut di atas, karena penulis sudah banyak mengetahui keadaan buku-buku di perpustakaan-perpustakaan tersebut. Di samping itu penulis menggunakan buku-buku koleksi pribadi, sehingga pelaksanaan penelitian ini selain dilakukan di perpustakaan juga dilakukan di rumah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, karena sumbernya menggunakan sumber-sumber tertulis yang berhasil dikumpulkan dari langkah heuristik. Mengingat penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat studi perpustakaan, maka metode pengukuran data yang penulis pakai adalah menggunakan metode dokumenter. Penelitian yang menggunakan sumber tertulis disebut dengan metode dokumenter, sedangkan metode dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan yang tertulis terutama berupa naskah dan termasuk buku-buku tentang pendapat-pendapat dan teori-teori, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (Nawawi, 1991:133). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang menggunakan sumber data berupa buku-buku, majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Adapun macam-macam sumber tertulis meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah yang didapat dari orang yang melihat dan mengalaminya secara langsung pada saat peristiwa itu terjadi. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh bukan dari orang yang melihat dan mengalaminya sendiri pada waktu peristiwa itu terjadi atau berasal dari informasi orang lain (Sjameuddin dan Ismann, 1996:73). Sumber primer digunakan untuk memperoleh derajat kebenaran yang tinggi dari hasil penelitian.

Penelitian sejarah diusahakan agar sedapat mungkin menggunakan sumber-sumber primer, sebab dengan menggunakan sumber primer diharapkan dapat diperoleh tingkat kebenaran yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan menggunakan sumber sekunder. Namun demikian sumber sekunder ini dapat di pakai apabila sumber primer tidak dapat diperoleh, hal ini disebabkan masalah yang diteliti waktunya lampau, sehingga kesulitan untuk mendapatkan sumber primer.

Sumber bahan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sumber informasi dokumenter yang bersifat primer, karena permasalahan yang penulis teliti waktunya belum terlalu lampau, sehingga sangat memungkinkan untuk mendapatkan sumber yang berasal dari kesaksian orang yang terlibat dan mengalami secara langsung peristiwa itu.

Sumber bahan penelitian ini selain diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, juga dapat diklasifikasikan menjadi sumber pokok dan sumber penunjang. Sumber pokok adalah sumber yang paling banyak di ambil dalam penulisan ini, sedangkan sumber penunjang adalah sumber pelengkap yang digunakan untuk memperkuat analisis permasalahan yang di bahas berdasarkan sumber-sumber pokok.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data melalui metode dokumenter, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang diperoleh. Proses analisis dilakukan untuk mendapatkan generalisasi atau kesimpulan yang akurat. Berkaitan dengan metode sejarah sebagai alat bantu merekonstruksi masa lalu secara ilmiah, maka diperlukan kemampuan berpikir yang logis dan sistematis sehingga dalam hal ini memerlukan metode pemecahan masalah melalui proses berpikir rasional dalam bentuk pemikiran yang terarah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis datanya menggunakan filosofis dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

Metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah dalam bentuk analisis sistematis berdasarkan pola pikir induktif dengan memperhatikan hukum-hukum berfikir yang logis (Nawawi, 1991:62). Penggunaan metode filosofik yang mendasarkan penalaran logis sangat sesuai dalam penelitian studi literatur, sebab penulisan sejarah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan cerita, akan tetapi yang lebih pokok adalah membuat uraian melalui penalaran yang logis dan kritis (Kartodirjo, 1992:230). Jadi dapat disimpulkan bahwa metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah melalui proses berfikir yang rasional, terarah, mendalam dan mendasar dengan menggunakan kerangka berfikir yang logis dan sistematis.

3.5.1 Logika Komperatif

Setudi komperatif digunakan di dalam penelitian sejarah adalah untuk meneliti hubungan dari berbagai fenomena dan persamaan suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi (Surahmad, 1989:36). Teknik logika komperatif digunakan dalam penelitian ini mengingat dalam merangkai fakta-fakta sejarah sebagai cerita harus menggunakan pemikiran yang logis, secara teratur menurut urutan waktu yang tepat dan berdasarkan hubungan sebab akibat (Kartodirjo,1992:19). Untuk mengetahui hubungan sebab akibat suatu cerita sejarah, maka fenomena-fenomena yang ada harus dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi teknik logika komparatif adalah cara untuk mencari faktor yang menyebabkan munculnya suatu peristiwa tertentu dengan membanding-bandingkan persamaan dan perbedaan data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk mengetahui sebab akibat terjadinya suatu peristiwa sejarah.

3.5.2 Logika Induktif

Teknik logika induktif adalah cara berpikir yang berlandaskan pada pengetahuan yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongrit, kemudian di tarik generalisasi yang bersifat umum (Hadi, 1987:42). Sedangkan menurut Nawawi (1991:18), logika induktif merupakan cara berpikir dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. Teknik logika induktif dalam penelitian ini dilakukan untuk menarik kesimpulan secara umum berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis data yang menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif adalah prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini melalui proses berfikir yang rasional dan terarah, dengan membanding-bandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai fenomena atau data antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di tarik suatu kesimpulan dari soal-soal yang khusus menuju konglusi yang bersifat umum, sehingga dapat menghasilkan cerita yang logis, kronologis dan sistematis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan, tinjauan kepustakaan dan pembahasan di Bab IV, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa peranan Angkatan 66 dalam pembubaran PKI, tampak pada tindakan-tindakan mereka tampil menjadi motor penggerak dan aktif ikut melakukan aksi-aksi turun ke jalan/demonstrasi-demonstrasi sepanjang tahun 1965-1966 dengan mendapat dukungan dari masyarakat yang anti komunis, dan dari tentara yang anti komunis. Mereka menuntut Soekarno agar membubarkan dan melarang PKI, tetapi karena tak berhasil mereka terus mendesak sampai dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemer) kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang kemudian dengan Supersemer itu akhirnya PKI dibubarkan dan dilarang terhitung mulai tanggal 12 Maret 1966.

5.2 Saran-Saran

Bersumber dari kesimpulan dan hasil analisis di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya lebih menguasai dan mendalami materi sejarah, khususnya materi sejarah Indonesia sehingga dapat menyampaikan kejadian-kejadian masa lalu yang utuh dan benar,
2. Bagi sejarawan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengadakan penelitian mengenai sejarah kontemporer secara lebih mendalam untuk mencari kebenaran yang obyektif berdasarkan kejadian sebenarnya,
3. Bagi generasi muda, sebaiknya mengetahui pengetahuan yang utuh atas kejadian-kejadian masa lalu umumnya dan memahami betapa tidak sesuainya ideologi komunis (Marxisme-Leninisme) khususnya, dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sebuah ideologi tidak

akan mati sehingga generasi muda harus mengetahui ideologi komunis yang tidak baik dan sangat berbahaya secara utuh dan obyektif sebagai bekal memasuki milenium III.

4. Bagi bangsa Indonesia hendaknya tetap membina, menjinakkan dan menjaga persatuan dan kesatuan agar ajaran komunisme tidak bisa hidup di negara Indonesia.
5. Bagi partai politik dan organisasi masyarakat, masyarakat harus tetap mewaspadaai setiap gejala kebangkitan kembali PKI (ajaran komunis) karena PKI akan melakukan gerakan strategis dan sistematis, seperti membentuk kader dan pimpinan partai atau organisasi masyarakat yang kemudian melakukan penetrasi terhadap lembaga yang dikuasai, terakhir melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan.



KEPUSTAKAAN

A.BUKU-BUKU

- Anwar, Yozar. 1982. *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. *)
- Boerhan dan Soebekti. 1965. *Fakta dan Latar Belakang Gerakan 30 September*. Jakarta: LPIPK Kosgoro.
- Lukman Ali, dkk. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Dua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoyonegoro, Dharmawan. 1966. *Ledakan Fitnah Subversi G 30 S*. Jakarta: Mitoa.
- Dyno, Todirun. 1993. *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G-30-SPKI*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Gottschalk, Louis. 1988. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press
- Habeyb, S.F. 1983. *Kamus Populer*. Jakarta: Y.B. Nurani
- Hatta. 1980. *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung
- Hadi, Surisno. 1987. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Jakup, Ueman dan A. T. Nasution. (tanpa tahun). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Energie.
- Kurniadi, H. Edi. 1987. *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik di Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Studi Ilmiah-Komasyarakatan. (tanpa tahun). *Rangkaian Pristiwa Pemberontakan Komunis Indonesia 1926-1948-1965*. Jakarta.
- Martha, Ahmaddani. G. Wibowo dan Y. Anwar. 1985. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Tiara Pustaka. *)

- Moechtar, Hasyrul. 1998. *Mereka Dari Bandung Pergerakan Mahasiswa Bandung 1960-1967*. Bandung: Alumni. *)
- Maurif, A. Syafi'i. 1988. *Islam Dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press
- Muhaimin, Yahya. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Markas Besar ABRI. 1995. *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid IV*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Moejanto, G. 1993. *Indonesia Abad ke-20 (2), Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai PELITA III*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, A.H. 1988. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6*. Jakarta: Haji Masagung. *)
- Noer, De'lar. 1991. *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI-Dephankam.
- , 1983. *Surat Perintah 11 Maret 1966 Garis Awal Orda Baru*. Jakarta: UI Press *)
- , 1985. *Tercapainya Konseensus Nasional 1966 - 1967*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poesponegoro, Marwati. D dan N. Notosusanto. 1953. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka *)
- Poerwadarminta, W.J.S. 1987. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Raillon, Francois. 1989. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Saniit, Arbi. 1987. *Sistem Politik Indonesia Kesetabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Soeharto. 1967. *Laporan Pangkolanib Dalam sidang Istimewa MPRS 1967*. Jogja: UP Indonesia *)
- Sekretariat Negara Republik Inonesia. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Komunis Indonesia Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya*. Jakarta. *)
- . 1983. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta.
- Soerojo, Soegiarso. 1989. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai G 30 S/PKI dan Peran Bung Karno*. Jakarta: Antar Kota. *)
- Simbolon, Parakitri. T. 1985. *Di Bali: Mitos Angkaian 66*. Jakarta: LP3ES.
- Saidi, R. dwan. 1989. *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*. Jakarta: LPMI. *)
- Sundhaussen, UIE. 1986. *Politik Miller Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.
- Soejono. 1975. *Monumen Pancasila Syakti*. Jakarta: Proyek Monumen Pancasila Syakti.
- Subhan, S. D. 1996. *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*. Yogyakarta: Benteng.
- Syamsu dan Syamsida. (tanp stahun). *Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS Tahun: 1966 - 1967 - 1968 dan MPR Tahun: 1973 - 1978 - 1983*. Malang: Penyebar Pengetahuan. *)
- Sutrasno. 1875. *Sejarah dan Ilmu Pengetahuan (History and Scince)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sjamsuddin, Helius. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud-Dirjen Dikti
- Sjamsuddin, Helius. dan Ismaun. 1996. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud-Dirjen Dikti
- Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsio.

Tan, Mely. G. 1991. "Masalah Perencanaan Penelitian Sosial". Dalam Koentjaraningrat (Ed). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Widja, I. G. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Semarang: Satya Wacana.

B. SURAT KABAR DAN MAJALAH

Atmojo. 1995. "Pengakuan Bekas Kepala CIA". Dalam *Gatra*. No. 48 14 Oktober. Jakarta: Halaman 29

Nasution, A.H. 1999. "Pak Nus Jergkel Pada Latif". Dalam *Surya* 27 April. Surabaya: Halaman 1.

-----, 1999. "Soal PKI, Pak Nas Tetap Bela Soeharto". Dalam *Jawa Pos* 27 April. Surabaya: Halaman 1.

-----, 1999. "Kebiasaan PKI Muncul Lagi". Dalam *Surya* 6 Mei. Surabaya: Halaman 1.

Sanit, Arbi. 1999. "Menropong Hantu Partai Komunis Indonesia". Dalam *Tekad* 19 - 25 April. Jakarta: Halaman 13.

Soeharto. 1999. "Soal FKI dan Pembunuhan Jendral-Jendral". Dalam *Gugat* 3 - 6 Mei. Surabaya: Halaman 4.

Sumbogo, Dryono. 1995. "Kesaksian Seorang Korban". Dalam *Gatra*. No. 48 14 Oktober. Jakarta: Halaman 30

Keterangan :

*) Suber Pokok

Lampiran 1:

MATERIK PENELITIAN

Judul	Varlabel	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
1	2	3	4	5	6
Peranan Angkatan 66 dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)	1. Peranan Angkatan 66 2. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)	Jenis Penelitian: Penelitian hirorik Sifat Penelitian: Studi literatur	Bagaimana peranan Angkatan 66 dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) ?	Buku Pokok: 11 Buah Buku Penunjang: 35 Buah Surat Kabar dan Majalah : 6 Buah	1. Metode Penentuan Tempat penelitian: Purposive Sampling 2. Metode pengumpulan data: Dokumenter 3. Metode analisis data: Metode Filosofik, dengan Teknik: 3.1 Logika Komparatif 3.2 Logika Induktif

Lampiran 2:

**PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS
MPRS/PIMPINAN BESAR REVOLUSI**

KEPUTUSAN No.1/3/1966

Menimbang:

1. Bahwa waktu-waktu yang akhir ini makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakukan oleh sisa-sisa kontra revolusi "Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;
2. Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penjebaran fitnah, hasutan, desas-desus, adu domba dan usaha penjusunan kekuatan bersendjata yang mengakibatkan terganggunya kembali keamanan Rakjat dan ketertiban;
3. Bahwa aksi-aksi gelap tersebut nyata-nyata membahayakan djalanja revolusi pada umumnja dan mengganggu penyelesaian tingkatan revolusi dewasa ini, chusunja penanggulangan kesulitan ekonomi dan pengganjangan Nekolim Malaysia;
4. Bahwa demi tetap terkonsolidasinja perutusan dan kosutuan segenap kekuatan progresip revolusioner rakjat Indonesia, dan demi pengamanan djalanja revolusi Indonesia yang anti feodalisme, anti Kapitalisme, anti Nekolim dan menuju terwujudnja Masjarakat Adil Makmur berdasarkan Panjasila, Masjarakat Sosialis Indonesia, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia.

Memperhatikan:

Hasil-hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh "Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia";

Mengingat:

Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pimpinan Besar Revolusi tanggal 11Maret 1966;

Memutuskan:

Menetapkan. Dengan tetap berpegang teguh pada Lima Azimat Revolusi Indonesia;

Pertama: Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya;

Kedua: Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang terlarang diseluruh wilayah/Kekuasaan Negara Republik Indonesia;

Ketiga: Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 12 Maret 1966

Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/
Mandataris MPRS/Pimpinan Besar Revolusi

Atas nama beliau

LLd

SOEHARTO

Letnan Djenderal TNI

Lampiran 3:

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
NO.XXV/MPR/1966**

Tentang

PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNJATAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAJAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGLATAN UNTUK MENJERBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MAXISME-LENINISME

**DENGAN RAKHMAI TUHAN JANG MAHA ESA,
MAJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnja bertentangan dengan Patjasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia jang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, chususnja Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia telah njata-njata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Republik Indonesia yang sah dengan djalan kekerasan;

- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia terhadap kegiatan-kegiatan yang menjeberkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Mengingat:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (3).

Mendengar:

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Djuni sampai dengan tanggal 5 Djuli 1966.

Memutuskan:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYAIAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAJAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENJEBAKANKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME.

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijakan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang teatas/berlindung/bernaung dibawahnya dan perujataan sebagai partai terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusan tanggal 12 Maret 1966

No.1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan MPRS.

Paral 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menjebarkan atau mengembngkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinja, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penjebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang .

Paral 3

Chususanya menjadi kegiatan mempelajari setjara ilmiah, seperti pada Universitas-Universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pantjasila, dapat dilakukan setjara terpinpin, dengan ketentuan, bahwa pemerintah DPRGR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Paral 4

Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Dietapkan di Djakarta

Pada tanggal 5 Djuli 1966

**MAJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

ttt

(Dr. A.H. Nasution)

Djenderal TNI

Wakil Ketua

ttt

(Osa Maliki)

Wakil Ketua

ttt

(M. Sirogar)

Wakil Ketua

ttt

(H.M. Subchan ZE)

Wakil Ketua

ttt

(Mashudi)

Brig. Djen TNI

Sesuai dengan aslinja .

Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS

ttt

(Wilujfo Purpo Judo)

Maj. Djen. TNI

Sumber : Syamsu dan syamsida. Tanpa Tahun. *Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS Tahun : 1966-1967-1968 Dan MPRS Tahun : 1973-1978-1983*. Malang: Penyebar Pengetahuan

Lampiran 4:

PENJELASAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
No. XXV/MPRS/1966

1. Fahaman atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan tendi-sendi kehidupan dan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan fahaman gotong rejong dan musjawarah untuk mufakat,
2. Fahaman atau ajaran Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin-Stalin, Mac Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Panjasila,
3. Fahaman Komunisme/Marxis-Leninisme yang disunt oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menjiptakan iklim situasi yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang berfalsafah Panjasila,
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menebarkan fahaman atau ajaran Komunisme/Maxisme-Leninisme.

Sumber: Syamsu dan Syamsida Tanpa Tahun. *Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS Tahun:1966-1967-1968 Dan MPR Tahun : 1973-1978-1983*. Malang: Penyebar Pengetahuan

UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kalimantan III/24 PO. BOX 195 Jember 68121
Telp. (0331) 83660, 88261 Fax. (0331) 88261
E-mail: lib-unej@indo.net.id

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR
NOMOR : 150/PT. 42 - H - 14 / 2 L E W ' 99

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fatkhul Alami Dwiarsa
NIM : 9402105226
Jur/Program : Pendidikan IPS/Pendidikan Sejarah
Fakultas : Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Angkatan : 1994

Terhitung mulai bulan April 1999 sampai bulan Agustus 1999 telah mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal	Tempat			
	R. Sirkulasi	R. Referen	R. OR	R. Skripsi
12-4-1999	X			
19-4-1999	X		X	
03-5-1999	X			
24-5-1999		X		
07-6-1999		X	X	
21-6-1999	X			
28-6-1999			X	X
05-7-1999	X			
19-7-1999	X	X		
02-8-1999			X	X
23-8-1999	X	X		

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 September 1999

An. Kepala
Kantong TU

Dr. Budiwati, S.Sos.
NIP. 130 683 181



DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

A. IDENTITAS

1. Nama : **Fatkhul Alami Dwiarto**
2. Tempat/Tanggal Lahir: **Banjarnegara, 22 Desember 1973**
3. Agama : **Islam**
4. Nama Ayah : **Moetohar**
5. Nama Ibu : **Nurul Ni'mah**
6. Pekerjaan Ayah/Ibu : **Purnawirawan ABRI/Wiraswasta**
7. Agama : **Islam**
8. Alamat a. Asal : **Gentansari Rt 02 Rw III, Kec. Bawang,
Banjarnegara, Jawa Tengah**
b. di Jember: **Jl. Kalimantan VI No. 98**

B. PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulus
1. SD N 1	Gentansari	1987
2. SMP N 2	Bawang	1990
3. SMA Muhammadiyah	Banjarnegara	1993

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus Bahasa Inggris di LPK Aquarius Banjarnegara 1993
2. Kursus Komputer di PPKIA Jember 1998
3. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa UNEJ 1998
4. Diklat Kewirausahaan LPM Universitas Jember 1999

D. KEGIATAN ORGANISASI

Nama Organisasi	Tempat	Tahun
1. Remaja Muhammadiyah	Banjarnegara	1991
2. Pengurus HMP Sejarah	FKIP-UNEJ	1996
3. Pengurus Senat Mahasiswa	FKIP	1996
4. Litbang Beasiswa PPA	Universitas Jember	1998
5. PMII	Rayon FKIP	1998
6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	Komisariat UNEJ	1998

E. HASIL KARYA TULIS

1. Peranan Angkatan 66 Dalam Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).